

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN TNI DALAM
PENANGGULANGAN KELAPARAN
DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH**

**Muhammad Abdul Ghofur
Arlan Sidha
Dadang Sufianto**

MIP Fisip Unjani
jurnalprinsip@fsp.unjani.ac.id

Abstract

Collaboration in addressing hunger in the Central Papua Province is a crucial effort in tackling the persistent challenge of hunger in this region. Central Papua is known for its abundant natural resources, yet there are disparities in resource distribution and food access, leading to hunger in some areas. Therefore, collaboration between the government, communities, and the private sector is necessary to achieve sustainable hunger eradication. This research aims to examine the collaboration between the Local Government and the Indonesian National Armed Forces (TNI) in addressing hunger in Puncak Regency. The research question focuses on how this collaboration operates.

The theoretical approaches used in this study include collaboration theory, bureaucracy theory, food security theory, and the concept of local government. The legal basis for this research comprises Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food and Nutrition Security, and Presidential Regulation Number 66 of 2019 concerning Coordination of Poverty Reduction Acceleration. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques involve literature review and field studies. Field studies include interviews and observations. Purposive sampling is used, with several informants: the Regional Secretary of Puncak Regency, Assistant 1 for Government Affairs of Puncak Regency, Secretary for Food Security of Puncak Regency, Secretary for Regional Boar for Disaster Management of Puncak Regency, District Head, 1717/Puncak Military District Commander and Indonesian Armed Forces Construction Task Force Commander.

The research findings indicate that the Local Government and the TNI have collaborated in mobilizing human, natural, and financial resources to provide aid to people experiencing hunger. This collaboration has also proven effective in expanding access to aid for those in need. The positive impact of this collaboration on the local community is evident. However, greater and sustained efforts are still required to comprehensively address

the issue of hunger in Puncak Regency.

Keywords: *Collaboration, Regional Government, TNI, Hunger*

PENDAHULUAN

Salah satu ancaman serius yang dihadapi manusia saat ini adalah krisis kelaparan. Jumlah penduduk yang terus meningkat telah menciptakan kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula. Tetapi hal itu seringkali tidak bisa dipenuhi dengan baik. Kelaparan sudah menjadi isu global yang membutuhkan penanganan serius oleh semua aktor dalam dunia Internasional. Setiap negara perlu memulai menggagas solusi alternatif untuk mewujudkan agar kualitas hidup masyarakatnya dapat terjamin. Hal ini perlu dilakukan mengingat ancaman yang di hadapi dunia tidak lagi didasarkan pada ancaman keamanan tradisional seperti perang dan konflik, melainkan lebih kepada isu yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Kelaparan dan kemiskinan saling berhubungan. Kelaparan merupakan permasalahan global yang dihadapi banyak negara. Masalah kelaparan biasanya melanda negara-negara yang sedang mengalami konflik, krisis dan negara berkembang, meskipun negara maju juga tidak luput dari permasalahan ini. Pada tahun 2009, masyarakat internasional mengangkat dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) bahwa komponen pertama adalah untuk mengurangi separuh populasi penduduk miskin yang hidup dengan satu dollar sehari dan mengurangi penduduk yang menderita kelaparan. Setelah masing-masing diukur, hal itu meninjau kemajuan ekonomi yang dicapai hingga saat ini.

Kelaparan, komponen kedua dari MDGs, yaitu disaat kekurangan makanan memerlukan makanan yang cukup dari segi kuantitas, kualitas, dan keragaman makanan. Efeknya berhubungan erat dengan hasil kesehatan. Dampak dari kelaparan adalah kehilangan energi, apatis, meningkat kerentanan terhadap penyakit, kekurangan dalam status gizi, kecacatan, dan kematian.

Meskipun kelaparan sebagian didorong oleh kemiskinan, ada faktor lain yang berhubungan dengan akses ke kesehatan dan pendidikan dan juga faktor penting lainnya adalah malnutrisi. Lebih dari 50 persen penduduk Negara berkembang yang kelaparan hidup di pertanian dan peternakan kecil yang terhubung ke ekonomi pedesaan. Sehingga pertumbuhan pertanian memiliki peran penting untuk mengurangi kelaparan dan kemiskinan yang melalui pengembangan pertanian (Braun, Hills and Pandya-Larch, 2009: 5).

FAO (*Food and Agriculture Organization*) adalah organisasi internasional di bawah naungan PBB. Yang berfokuskan kepada pangan dan pertanian sudah membantu banyak Negara yang mengalami

kelaparan. FAO menyadari tidak setiap orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini akan mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Hampir 800 juta penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Indonesia masuk kategori 100 negara termiskin di dunia sebagaimana dirilis Idris Rusadi Putra pada merdeka.com 2 Oktober 2023. Dalam tajuknya mencatat angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2023 berada di angka 9,54 % atau sekitar 26,16 Juta orang dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Hal tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Provinsi Papua Tengah Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pada saat yang sama, wilayah ini juga menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kelaparan. Kelaparan merupakan masalah yang kompleks di Papua Tengah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, keterbatasan infrastruktur, serta masalah sosial dan ekonomi yang mendalam.

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan langkah penting dalam menjalankan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. (Moleong, 2017) Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukanhipotesis (Sugiyono, 2022).

Dari uraian di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, menafsirkan, dan menggambarkan bagaimana Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam Penanggulangan Kelaparan di Kabupaten Puncak-Provinsi Papua

Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya peneliti menganalisis fenomena tersebut sehingga di dapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti beserta faktor-faktor yang mempengaruhi Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam Penanggulangan Kelaparan di Kabupaten Puncak-Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam penentuan *Collabartive Governance*.

KERANGKA TEORI

Provinsi Papua Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki masalah kelaparan. Kelaparan merupakan isu yang sangat kompleks dan serius yang mempengaruhi kehidupan ribuan orang di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, penanggulangan kelaparan ini perlu melibatkan berbagai pihak dan melalui kerjasama yang erat, yang dikenal sebagai *collaborative governance*.

Collaborative governance adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dalam konteks penanggulangan kelaparan di Provinsi Papua Tengah, *collaborative governance* menjadi sangat penting karena tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kelaparan ini sangat kompleks dan membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam *collaborative governance* ini. Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus memimpin dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk mendorong kolaborasi ini. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah serta pemerintah pusat, agar kolaborasi penanggulangan kelaparan ini dapat berjalan dengan baik.

Selain kolaborasi antarpihak, penanggulangan kelaparan di Provinsi Papua Tengah juga memerlukan sinergi antarprogram dan kebijakan. Berbagai program dan kebijakan yang ada perlu saling mendukung dan berjalan dalam arah yang sama. Penting bagi pemerintah, masyarakat, unsur TNI, dan sektor swasta untuk berkoordinasi dan berkomunikasi secara terus-menerus guna memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang maksimal. Dalam menjalankan *collaborative governance* ini, transparansi dan akuntabilitas juga perlu menjadi prinsip utama yang ditekankan. Setiap pihak harus bersedia memberikan informasi

mengenai kegiatan yang dilakukan serta hasil yang telah dicapai. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kolaborasi dalam penanggulangan kelaparan ini akan lebih terjaga dan efektif.

Guna mengukur Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam Penanggulangan Kelaparan di Kabupaten Puncak-Provinsi Papua Tengah, peneliti menggunakan teori menurut Tirrel & Clay (2010) mengkonsepkan bahwa dalam kolaborasi terjadi transisi aktifitas yang dibagi menjadi 5 (lima) tahapan dirangkum mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Pemilihan teori ini dikarenakan indikator yang dipaparkan dinilai telah mencakup seluruh tahapan pelaksanaan kolaborasi.

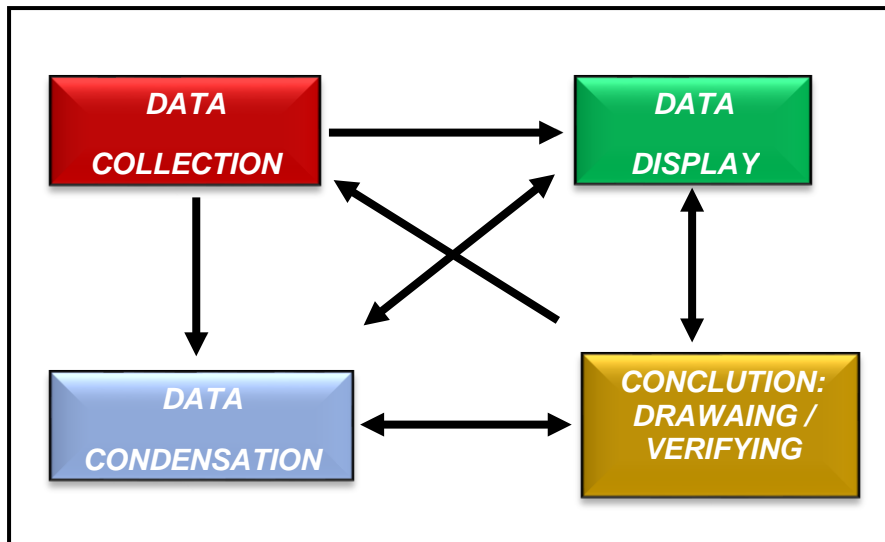
1. Eksplorasi. Pada tahap ini terjadi pertemuan antara pihak yang berkepentingan dapat dilakukan secara formal maupun informal seperti pertemuan dalam bentuk penyampaian pendapat, rapat, pembagian informasi, dan diskusi mengenai peninjauan opini.
2. Formasi. Pada tahap ini kolaborasi sudah terjadi. Kreasi dan persetujuan mulai terlihat prosedur dan struktur operasional dikembangkan. Selain itu tujuan juga telah dirumuskan dan aksi bersama dikembangkan.
3. Tumbuh. Pada tahap ini pengaturan terhadap prioritas dan perencanaan ditekankan, proses operasional dirutinkan. Kemudian telah dilakukan upaya untuk memperjuangkan konsensus, formulasi, dan implementasi.
4. Dewasa. Tahap ini sudah masuk dalam tingkatan pengembangan. Dana partisipasi dan akses stabil. Semua strategi didesain dengan basis berkelanjutan. Hasil kolaborasi dibagi kepada semua pihak dan tujuankolaborasi dinilai.
5. Akhir. Pada tahap terakhir ini, kolaborasi sudah bekerja secara ideal dan sempurna. Ada kepuasan dari masing-masing pihak atas hasil yang dilakukan. Kolaborasi sukses menyelesaikan masalah ketika terjadi penurunan, sehingga dilakukannya pembaruan.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang bertujuan untuk menyusun data secara sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian diproses, diorganisasikan, dikategorikan dan dipilah sesuai dengan satuan satuannya, disintetiskan, dicari dan ditemukan polanya, serta diinterpretasikan guna memperoleh keselarasan antara permasalahan dengan hasil penelitian (Sugiyono, 2022).

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini peneliti

menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara terus menerus. Sugiyono (2022) mendeskripsikan analisis data hasil penelitian menggunakan model Miles dan Huberman yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), seperti gambar berikut



Proses Analisis Data Kualitatif
(Model Analisis Data Miles Huberman)

PEMBAHASAN

Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2008, Kabupaten Puncak beribukota di Ilaga terbagi dalam 80 Desa dan terdiri dari 8 distrik, yaitu:

(1) Agadugume, (2) Gome, (3) Ilaga, (4) Sinak, (5) Pogoma, (6) Wangbe, (7) Beoga, dan (8) Doufo.

Kabupaten Puncak merupakan salah satu pintu gerbang untuk mendaki Puncak Cartenz, gunung tertinggi di Indonesia, yakni melalui Ilaga dan Beoga. Pada September 2022, Kabupaten Puncak diusulkan akan berganti nama menjadi Kabupaten Puncak Papua. Kabupaten Puncak terletak di kawasan tertinggi di Indonesia. Kabupaten ini terletak di antara ketinggian 1.500-4.000 meter di atas permukaan laut. Kota Ilaga merupakan salah satu pintu masuk menuju Puncak Cartenz. Kabupaten ini dapat diakses melalui jalur udara dari Kota Timika atau Nabire selama 25 menit dengan pesawat berbadan kecil. Batas Wilayah Kabupaten Puncak Prov Papua

Utara	Kabupaten Mamberamo Raya
Timur	Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya
Selatan	Kabupaten Mimika
Barat	Kabupaten Intan Jaya

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai

tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal

3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam penanggulangan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kelaparan. Kelaparan merupakan masalah serius yang dapat mengancam kehidupan dan kesejahteraan banyak orang, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam upaya penanggulangan kelaparan sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah memiliki peran utama dalam menangani masalah kelaparan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Namun, dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam menangani kelaparan. Inilah saat dimana kolaborasi dengan TNI dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

TNI, dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, dapat memberikan dukungan logistik dan teknis dalam penanggulangan kelaparan. Mereka dapat membantu dalam distribusi bantuan pangan dan obat-obatan ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah. Selain itu, personel TNI juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pertanian dan peternakan agar mereka dapat memproduksi pangan secara mandiri.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI juga dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mempercepat respons dalam penanggulangan kelaparan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan program penanggulangan kelaparan. Kehadiran TNI di lapangan juga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak kelaparan dan mempercepat proses pemulihan kembali ke kondisi normal.

Dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan kelaparan, penting bagi pemerintah daerah dan TNI untuk saling mendukung dan bekerja sama secara sinergis. Kolaborasi yang baik antara keduanya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penanggulangan kelaparan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam penanggulangan kelaparan merupakan langkah yang tepat dan perlu terus ditingkatkan demi mencapai Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya.

Salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara TNI dengan Pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana kelaparan baik di pusat maupun di daerah. TNI sebagai kekuatan pertahanan darat di Indonesia mengemban misi tidak hanya menangkal, menindak dan menghancurkan musuh semata, melainkan juga mengemban misi sipil (*civic mission*), berupa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana kelaparan di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya di Pasal 7, ayat 2, butir 12, yang berbunyi: “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Hal inilah yang mendasari secara yuridis bagi TNI AD untuk terus berkomitmen membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana kelaparan dengan semua komponen bangsa lainnya.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak

Kabupaten Puncak di Papua Tengah dilanda krisis kelaparan parah yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Kekeringan ekstrem, aksesibilitas yang sulit, dan konflik berkepanjangan menjadi faktor utama yang memicu bencana ini. Ribuan warga, terutama di Distrik Agandugume dan Lambewi, menderita akibat kekurangan pangan yang parah, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Puncak di Papua Tengah dilanda krisis kelaparan parah, diantaranya:

1. Kegagalan pertanian dan perkebunan : fenomena hujan es dan embun es menyebabkan tanaman pada lahan pertanian masyarakat mengalami pembusukan dan gagal panen. Hal tersebut diperparah dengan tidak turunnya hujan sejak fenomena hujan es dan embun es terjadi.
2. Kekurangan Pangan : akibat kegagalan panen pada lahan pertanian dan perkebunan masyarakat menyebabkan tidak tersedianya bahan makanan pokok sehingga menimbulkan kekurangan pangan terutama pada kelompok rentan masyarakat, yaitu ibu hamil, anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan yang terkena dampak yang paling besar.

3. Malnutrisi : Terbatasnya ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya akibat bencana yang terjadi serta terganggunya akses penerbangan, menimbulkan dampak kekurangan makanan serta meningkatkan risiko malnutrisi di kalangan masyarakat terdampak terutama pada ibu hamil, anak-anak dan lansia.

Selanjutnya, pendekatan *colaborative government* juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kelaparan. Dalam kerangka *colaborative government*, pemerintah daerah dan TNI bekerja bersama-sama dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam mengatasi kelaparan. Dengan berkolaborasi, berbagai kebijakan dapat dirumuskan secara partisipatif dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, konsep ketahanan pangan juga menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak. Pemerintah daerah bersama TNI perlu meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi pangan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian dan peternakan. Selain itu, penguatan jaringan distribusi pangan dan upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan.

Eksplorasi

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kabupaten Puncak merupakan salah satu daerah yang sering dilanda kelaparan akibat minimnya sumber daya dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun, dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI, penanggulangan kelaparan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam pendekatan dimensi Eksplorasi, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan tahap pertama yang dilakukan adalah pertemuan antara pihak yang berkepentingan. Pertemuan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal, seperti rapat, penyampaian pendapat, pembagian informasi, atau diskusi mengenai peninjauan opini. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan TNI perlu melakukan pertemuan untuk membahas strategi penanggulangan kelaparan yang efektif.

Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kondisi terkini mengenai kelaparan di Kabupaten Puncak, termasuk data

dan informasi terkait jumlah korban serta kondisi sumber daya yang tersedia. Sementara itu, TNI dapat memberikan kontribusi berupa tenaga atau logistik untuk mendukung upaya penanggulangan kelaparan. Kolaborasi antara kedua pihak ini akan memperkuat sinergi dalam menangani masalah kelaparan di Kabupaten Puncak. Selain itu, pertemuan antara Pemerintah Daerah dan TNI juga dapat mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak yang terkait dengan penanggulangan kelaparan, seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat setempat, dan ahli yang terkait dengan masalah kelaparan. Dengan mendengarkan berbagai pendapat dan informasi, kedua pihak dapat merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan terukur dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak.

Dalam upaya penanggulangan kelaparan, berbagai pertemuan formal dan informal memainkan peran penting. Pertemuan formal, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, TNI, BPBD, dan Pemerintah Pusat, digunakan untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana aksi terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan ini diadakan secara berkala, seperti triwulanan atau sesuai kebutuhan mendesak, untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam mengatasi kelaparan. Di sisi lain, pertemuan informal dimaksudkan untuk mempercepat pertukaran informasi, memecahkan masalah yang muncul di lapangan, dan memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan. Diskusi dalam pertemuan informal sering kali lebih fokus pada isu-isu praktis seperti logistik, distribusi bantuan,

kondisi keamanan, dan respon cepat terhadap situasi darurat. Dengan sifatnya yang lebih dinamis dan fleksibel, pertemuan informal memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merespons dengan cepat terhadap tantangan yang muncul dalam upaya penanggulangan kelaparan. Kedua jenis pertemuan ini saling melengkapi dan berkontribusi pada upaya penanggulangan kelaparan yang efektif. Pertemuan formal menyediakan kerangka kerja strategis dan kebijakan yang kuat, sementara pertemuan informal memungkinkan adaptasi dan respons cepat terhadap situasi yang berkembang di lapangan. Melalui kombinasi keduanya, diharapkan upaya penanggulangan kelaparan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.”

Formasi

Pada tahap ini kolaborasi sudah terjadi. Kreasi dan persetujuan mulai terlihat prosedur dan struktur operasional dikembangkan. Dimensi Formasi dalam kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan TNI dalam

penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak merupakan tahapan penting dalam memastikan keberhasilan dari upaya tersebut. Pada tahap ini, kolaborasi telah terjadi di antara kedua belah pihak dan keduanya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Salah satu dimensi dari Formasi adalah kreasi dan persetujuan. Dalam konteks penanggulangan kelaparan, kedua pihak bekerja sama untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah kelaparan di Kabupaten Puncak. Mereka juga mencapai kesepakatan pada langkah-langkah yang akan diambil dan strategi yang akan diterapkan.

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak menunjukkan hasil yang positif, Adapun kesimpulan tersebut;

- 1. Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak, berdasarkan dimensi Kolaborasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:**
 - a. Pertama-tama, dimensi eksplorasi mengacu pada tahap awal kolaborasi di mana pihak-pihak terlibat mencari tahu kepentingan, sumber daya, dan kemungkinan kerjasama. Dalam konteks kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI di Kabupaten Puncak, keduanya berhasil menjelajahi berbagai potensi dan kebutuhan yang ada dalam penanggulangan kelaparan. Mereka secara aktif melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang terdampak kelaparan dan mengumpulkan informasi tentang kondisi masyarakat setempat.
 - b. Kedua, dimensi formasi mengacu pada proses pembentukan dan perumusan kerangka kerja kolaborasi. Pemerintah Daerah dan TNI di Kabupaten Puncak berhasil membentuk struktur kerjasama yang jelas dan efektif. Mereka menetapkan tujuan bersama untuk mengatasi kelaparan, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta merumuskan rencana aksi yang terinci.
 - c. Ketiga, dimensi tumbuh mengacu pada pencapaian keberhasilan dan peningkatan kualitas kerjasama seiring berjalannya waktu. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI di Kabupaten Puncak terus berkembang dan memperlihatkan hasil yang positif. Mereka aktif bekerja sama dalam mendistribusikan bantuan pangan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mandiri memenuhi kebutuhan pangan mereka.

- d. Keempat, dimensi dewasa mengacu pada tahap kematangan kolaborasi di mana pihak-pihak terlibat telah memahami dinamika kerjasama dengan baik dan mampu mengatasi tantangan yang muncul. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI di Kabupaten Puncak dapat dikatakan telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi. Mereka mampu menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat dengan baik serta terus bersinergi untuk mencapai hasil yang optimal.
- e. Terakhir, dimensi akhir mengacu pada tahap penyelesaian atau evaluasi kolaborasi. Dalam konteks penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak, kerjasama antara Pemerintah Daerah dan TNI berakhir dengan sukses. Mereka berhasil mengurangi tingkat kelaparan di wilayah tersebut dan menciptakan keberlanjutan program-program bantuan pangan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak dapat dikatakan berhasil berdasarkan lima dimensi teori kolaborasi. Mereka berhasil menjelajahi, membentuk, tumbuh, menjadi dewasa, dan akhirnya mencapai kesuksesan dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah kelaparan yang melanda masyarakat setempat. Semoga kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Puncak.

2. Faktor penghambat kolaborasi Pemerintah Daerah dengan TNI dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak dan upaya untuk mengatasinya

Penanggulangan kelaparan merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, dalam pelaksanaan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan TNI dalam penanggulangan kelaparan di Kabupaten Puncak, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu dihadapi dan diatasi.

a. Faktor Hambatan:

- 1) Kabupaten Puncak memiliki medan yang berat (pegunungan dan hutan lebat), dan kurangnya infrastruktur dasar (jalan, jembatan, landasan pacu pesawat yang pendek serta kurangnya fasilitas penyimpanan pangan). Hal inilah yang menghambat kelancaran

distribusi pangan dan dan koordinasi antar pihak.

- 2) Kondisi keamanan yang belum sepenuhnya stabil di beberapa wilayah Kabupaten Puncak dapat mengganggu pelaksanaan program penanggulangan kelaparan dan membahayakan keselamatan petugas.
- 3) Keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan baik di pihak Pemerintah Daerah maupun TNI dapat menghambat efektivitas program penanggulangan kelaparan.
- 4) Kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program penanggulangan kelaparan dapat mengurangi dampak positif dari upaya yang dilakukan.

b. Upaya untuk Mengatasi Hambatan:

- 1) Pemerintah Daerah dan TNI perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur dasar di Kabupaten Puncak, seperti membangun jalan, jembatan, pelebaran dan perpanjangan landasan pesawat di Bandara serta pembangunan Gudang logistik (penyimpanan pangan) yang memadai.
- 2) Upaya menjaga keamanan dan stabilitas wilayah menjadi tanggung jawab dari Aparat Keamanan (TNI dan Polri), dengan tetap selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat setempat.
- 3) Pemerintah Daerah dan TNI perlu mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan jumlah personel yang terlibat, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung program penanggulangan kelaparan.
- 4) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan TNI perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam program penanggulangan kelaparan.
- 5) Kolaborasi tidak hanya antara Pemerintah Daerah dan TNI, tetapi juga dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dapat memperkuat upaya penanggulangan kelaparan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ariningsih, E. & Rachman, H. P., 2016. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. *ejurnal Litbang Pertanian*, pp. 239-225.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian, I., 2020. Buletin Harga Pangan Indonesia. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Indonesia.
- BBC News. 2023. Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal karena kelaparan, mengapa bencana ini terus berulang di Papua?. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv207n5y9pdo>
- Budiyanto, Rachmat, 2009, Peningkatan Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Sishankamrata Guna Ketahanan Nasional, Lemhannas, Jakarta
- Buku Putih Pertahanan RI. 2003. Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- CFS, C. o. W. F. S., 2012. *Coming to Terms with Food Security, Nutrition Security, Food Security and Nutrition*, Food and Nutrition Security. s.l., FAO.
- Emily R. Lai. 2011. *Collaborations: A Literature Review*, Pearson.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Prabowo, D. W., 2014. *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process*, Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- R Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. *Good governance and legal reform in Indonesia,(Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007)*
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Ulber Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Refika Aditama.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.